

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), teori ini menjelaskan hubungan yang terjadi antara pemilik dan pemegang saham (prinsipal) dengan manajer (agen). Hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Di dalam suatu perusahaan yang disebut prinsipal adalah pemegang saham atau investor dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Eisenhardt (1989) mengungkapkan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality).
3. Manusia selalu menghindari risiko (risk adverse). Teori agensi memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik

Kepentingan antara principal dan agent (Gerianta, 2009). Pihak pemilik (principal) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer (agent) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dibutuhkan kontrak yang jelas yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan meminimalisir konflik keagenan. Salah satu kendala yang akan muncul antara agen dan prinsipal adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen

sebaliknya, agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan (Widyaningdyah, 2001). Adanya asimetri informasi dapat mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen. Agen dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen (Ujiyantho, 2007).

Salah satu cara untuk meminimalisir konflik keagenan dan asimetri informasi yaitu dengan menerapkan suatu mekanisme pengawasan melalui tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*.

2.1.2 Good Corporate Governance

Di era globalisasi pasar saat ini setiap perusahaan selain dituntut untuk semakin inovatif juga harus mempunyai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar dapat terus bertahan. Komite Cadbury mendefinisikan Good Corporate Governance, sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Sedangkan menurut Center for European Policy Studies (CEPS) GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun diluar manajemen perusahaan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di dalam situs resminya menyebutkan bahwa secara umum istilah *good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Untuk mencapai kesinambungan usaha

(sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders) diperlukan asas GCG, sebagai berikut:

1. **Transparansi (Transparency)** Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. **Responsibilitas (*Responsibility*)** Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
4. **Independensi (*Independency*)** Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)** Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Adanya sistem corporate governance diperusahaan diyakini akan membatasi pengelolaan earning management. Karena itu diduga dengan semakin tingginya kualitas audit, semakin tingginya proporsi dewan komisaris independen, dan adanya komite audit maka akan semakin kecil pengelolaan laba yang oportunistik (Siregar, dkk, 2005).

Dalam penelitian ini unsur-unsur yang digunakan untuk mengukur good corporate governance antara lain:

1. Ukuran Dewan Komisaris

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006). Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996). Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya agency problems (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack 1996). Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan yang semakin menurun (Yermack, 1996).

2. Komposisi Dewan Komisaris

Tindakan manajemen laba yang dapat berkembang menjadi manipulasi laba atau bahkan kecurangan laporan keuangan turut dipengaruhi oleh adanya pengawasan perusahaan yang tidak efektif. Fungsi pengawasan dari komisaris independen

dibutuhkan sebagai control perusahaan terhadap aktivitas yang dilakukan manajer perusahaan. Minimnya jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan para manajer dapat leluasa melakukan manipulasi laba sesuai dengan yang mereka inginkan. Pentingnya independensi juga ditekankan oleh KNKG (2006) yang menyebutkan bahwa komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

3. Komite Audit

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ Nomor SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Seperti diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,

- 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan

2.1.3 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi adalah suatu sikap dan pandangan akuntansi berdasarkan sikap pesimistik dalam menghadapi ketidakpastian laba atau rugi yang dilakukan dengan prinsip meminimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan dengan cara memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan biaya, merendahkan nilai aset dan meninggikan penilaian utang. Konservatisme akuntansi merupakan sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (*outcome*) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi resiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko.

Menurut FASB Statement of Concept No.2, konservatisme akuntansi adalah reaksi hati-hati menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko intern dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan.

Prinsip konservatisme telah menjadi konsep pencatatan akuntansi yang diterapkan secara luas dalam beberapa dekade belakangan ini. Prinsip yang telah menjadi standar pencatatan utama pada tiga dekade awal abad ke-20 diterapkan untuk mengimbangi optimisme manajemen serta kecenderungan mereka dalam *men-overstate* laporan keuangan. Konsep konservatisme menyatakan bahwa dalam keadaan-keadaan yang tidak pasti manajer perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan,

kejadian, atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan (Yenti dan Sofyan, 2013). Beberapa metode maupun estimasi akuntansi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Revisi 2015 yang menyebabkan konservatisme dalam pelaporan keuangan adalah:

1. PSAK No. 14 tentang Persediaan, menyatakan bahwa biaya persediaan dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang. Entitas menggunakan rumus biaya yang sama terhadap seluruh persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, diperkenankan menggunakan rumus yang berbeda.

2. PSAK No. 16 tentang Aset Tetap

a) Mengijinkan manajemen untuk mengestimasi masa manfaat suatu aktiva tetap berdasarkan kegunaan yang diperkirakan oleh entitas. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat yang akan digunakan.

b) Mengijinkan manajemen memilih metode penyusutan untuk mengalokasikan jumlah aktiva yang bisa disusutkan dengan suatu dasar sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset.

3. PSAK 19 tentang Aset Takberwujud, menyatakan bahwa berbagai metode amortisasi dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan aset atas dasar yang sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut mencakup metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pada pola konsumsi ekonomik masa depan yang diperkirakan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola konsumsi tersebut.

4. PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset, dimana penurunan nilai aset merupakan rugi yang harus segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset

disajikan pada penurunan nilai aset revaluasian diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Adanya aturan kebebasan dalam pemilihan metode akuntansi tersebut memungkinkan perusahaan untuk memilih metode yang dirasa paling tepat dan menguntungkan untuk diterapkan dalam perusahaan tertentu. Penerapan akuntansi yang konservatif, memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna informasi keuangan. Dalam kontrak diantara kelompok yang berbeda, pengguna akuntansi yang konservatif pada perusahaan dapat menurunkan masalah asimetri informasi dan moral hazard yang berasal dari konflik agen. Kontrak yang ditulis dengan prinsip kehati-hatian akan mengurangi kemungkinan ekspropriasi manajer terhadap sumber daya perusahaan atau distribusi yang berlebihan pada sumber daya tersebut (Watts, 2003).

Konservatisme akuntansi dalam penerapannya selain ada beberapa pihak yang setuju namun ada juga pihak-pihak yang menentang konsep ini karena dianggap konservatisme akuntansi tidak bermanfaat karena mengandung informasi yang bias dan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di perusahaan. seperti yang diungkapkan oleh Kiryanto dan Supriyanto, (2006), mereka beranggapan bahwa laporan akuntansi yang dihasilkan dengan metode yang konservatif cenderung bias dan tidak mencerminkan realita. Pendapat ini dipicu oleh definisi mengenai akuntansi konservatif, dimana metode ini mengakui kerugian lebih cepat daripada pendapatan, sehingga tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya yang dialami perusahaan.

Konservatisme saat ini dipandang lebih sebagai pedoman untuk diikuti dalam situasi luar biasa dan bukan sebagai aturan umum untuk diterapkan secara kaku dalam semua situasi. Konservatisme masih digunakan dalam beberapa situasi yang memerlukan penilaian akuntan, seperti memilih estimasi umur manfaat dan nilai sisa dari aktiva untuk akuntansi depresiasi dan konsekuensi aturan dari penerapan konsep “mana yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar” dalam penilaian persediaan serta efek-efek ekuitas yang dapat dijual (Belkaoui, 2006:288). Proksi yang digunakan dalam mengukur intensitas modal pada umumnya sama tergantung dari tujuan penelitian. Watts (2003) membagi

konservatisme menjadi 3 pengukuran, yaitu *Earning/Stock Return Relation Measure*, *Earning/Accrual Measures*, *Net Asset Measure*. Berbagai peneliti telah mengajukan berbagai metode pengukuran konservatisme. Berikut beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watts (2003) dalam Savitri (2016:45-53):

1. *Earning/Stock Return Relation Measure*

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset pada saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi ataupun laba tetap dilaporkan sesuai dengan waktunya. Model ini digunakan dalam penelitian Basu (1997) menggunakan model *piecewise-linear regression* sebagai berikut:

$$\Delta NI = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta NI_{t-1} + \alpha_2 D \Delta NI_{t-1} + \alpha_3 D \Delta NI_{t-1} \times \Delta NI_{t-1} + \epsilon_t$$

Dimana ΔNI_t adalah net income sebelum adanya extraordinary items dari tahun $t-1$ hingga t , yang diukur dengan menggunakan total assets awal nilai buku. Sedangkan $D \Delta NI_{t-1}$ adalah dummy variable, dimana bernilai 1 jika perubahan ΔNI_{t-1} bernilai negatif.

2. *Earnings Accruals Measure*

Pada model tipe ini, konservatisme diukur dengan menggunakan akrual, yaitu selisih antara laba bersih dari kegiatan operasional dengan arus kas. Givoly membagi akrual menjadi dua, yaitu operating accrual yang merupakan jumlah akrual yang muncul dalam laporan keuangan sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan dan non-operating accrual yang merupakan jumlah akrual yang muncul diluar hasil kegiatan operasional perusahaan. Semakin kecil ukuran akrual suatu perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin menerapkan prinsip akuntansi yang konservatif (Yenti dan Sofyan, 2013). Pengukuran konservatisme dengan operating accruals dilakukan menggunakan Model Givoly dan Hayn (2000) yaitu :

$$CONNAC = (NI_{it} - CFO_{it}) \times -1$$

CONNAC : Tingkat konservatisme perusahaan i pada waktu t

NI_{it} : Laba sebelum extraordinary items ditambah depresiasi

CFOit : Arus kas dari kegiatan operasi

Semakin kecil ukuran akrual suatu perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin menerapkan prinsip akuntansi yang konservatif.

Givoly dan Hayn (2000) melihat kecenderungan dari akun akrual selama beberapa tahun. Apabila terjadi akrual negative (net income lebih kecil daripada cash flow operasional) yang konsisten selama beberapa tahun, maka merupakan indikasi diterapkannya konservatisme.

3. Net Asset Measure

Ukuran ketiga yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam laporan keuangan adalah nilai aktiva yang understatement dan kewajiban yang overstatement. Salah satu model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) yaitu dengan menggunakan *market to book ratio* yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya.

Pada penelitian ini menggunakan proksi *earnings accruals measure* seperti pada penelitian Givoly dan Hayn (2000), semakin negatif tingkat akrual rata-rata selama periode tertentu, maka prinsip akuntansi yang digunakan semakin konservatif. *Earning accluars measure* dipilih karena dalam penelitian ini akan meneliti konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba, dimana manajemen laba biasanya dilihat dari akun akrual perusahaan, sehingga proksi konservatisme akuntansi menggunakan *earning accruals measure* dimana melihat tingkat akrual periode tertentu.

2.1.4 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan masalah keagenan yang seringkali dipicu oleh adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan (Iqbal, 2007). Tindakan manajemen laba ini dimungkinkan dengan lebih banyaknya informasi yang dimiliki oleh manajer selaku agen yang menjalankan perusahaan dibandingkan prinsipal. Hal ini

mengakibatkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara agen dan prinsipal. Ketidakseimbangan informasi itu disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi ini erat kaitannya dengan konsep teori keagenan (*agency theory*) yaitu ketika semua pihak memiliki dorongan untuk mendahulukan kepentingannya sendiri-sendiri sehingga timbul adanya konflik antara prinsipal dengan agen. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang disesuaikan untuk kepentingan agen kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Salah satu bentuk tindakan agen tersebut adalah yang disebut sebagai manajemen laba (Widyaningdyah, 2001).

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat ini dari suatu unit yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa mengkaitkan dengan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang (Fischer dan Rosenzweig, 2011). Sedangkan Assih dan Gudono (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja, dalam batasan *general accepted accounting principles*, untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporkan. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na'im, 2000). Sedangkan menurut Sugiri (1998) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu:

- a. Definisi Sempit Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajemen untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya laba.
- b. Definisi Luas Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana

manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer didasari berbagai motivasi yang berbeda-beda. Scott (2009) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba, yaitu:

1. *Bonus Scheme* (Rencana Bonus) Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya.
2. *Debt Covenant* (Kontrak Utang Jangka Panjang) Menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang maka para manajer akan cenderung untuk memilih metoda akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak utang.
3. *Political Motivations* (Motivasi Politik) Menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba terutama pada saat periode kemakmuran yang tinggi. Upaya ini dilakukan dengan harapan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah.
4. *Taxation Motivations* (Motivasi Perpajakan) Menyatakan bahwa perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.
5. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*) Biasanya CEO yang mendekati masa pensiun atau masa kontraknya menjelang berakhir akan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna meningkatkan jumlah bonus yang akan mereka terima. Hal yang sama akan dilakukan oleh manajer dengan kinerja yang buruk. Tujuannya adalah menghindarkan diri dari pemecatan sehingga mereka cenderung untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan.
6. *Initial Public Offering* (Penawaran Saham Perdana) Menyatakan bahwa pada awal perusahaan menjual sahamnya kepada publik, informasi keuangan yang

dipublikasikan dalam prospektus merupakan sumber informasi yang sangat penting. Informasi ini penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial terkait dengan nilai perusahaan.

Guna mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para investor maka manajer akan berusaha untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh manajer dalam melakukan manajemen laba, bergantung pada kondisi dan situasi perusahaan tersebut. Pola manajemen laba menurut Scott (2009) dapat dilakukan dengan cara:

1. *Taking a Bath*

Taking a bath terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga mengharuskan manajemen membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi.

2. *Income Minimization* Bentuk ini mirip dengan *taking a bath*, tetapi lebih sedikit ekstrim, yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aset tetap dan aset tak berwujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat rasio profitabilitas perusahaan tinggi, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aset tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan.

3. *Income Maximization* Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

4. *Income Smoothing* Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

Penggunaan pengukuran atas dasar akrual sangat penting untuk diperhatikan dalam mendeteksi ada tidaknya manajemen laba dalam perusahaan. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. akrual dapat dibebankan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusun
2. Bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut dengan abnormal accruals atau discretionary accruals.

2.2 Penelitian Terdahulu

Bagheri, et. al, (2013) meneliti mengenai pengaruh tingkat konservatisme akuntansi, kontrak hutang dan profitabilitas pada manajemen laba perusahaan, data diperoleh dari Bursa Efek Teheran periode 2006-2010, menggunakan 140 perusahaan sebagai sampel. Manajemen laba diprosikan dengan discretionary accruals menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Modified Jones Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat konservatisme akuntansi dan return on equity memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan manajemen laba, dan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat tinggi pelaporan keuangan yang konservatif mungkin tingkat perilaku manajemen labanya lebih tinggi. Selain itu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan negatif antara kontrak utang dan manajemen laba dan juga, ukuran komite audit, ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada manajemen laba.

Penelitian mengenai pengaruh GCG dan konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba juga dilakukan oleh Prabaningrat dan Widanaputra (2015), objek penelitiannya yaitu pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode 2009 hingga 2012. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara statistik antara Good Corporate Governance yang diprosikan dengan komisaris independen dan konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 hingga 2012.

Gea (2014) meneliti peran good corporate governance dan struktur kepemilikan dalam mendeteksi manajemen laba melalui discretionary revenue, hasilnya menunjukkan bahwa *good corporate governance* yang diukur menggunakan indeks dari IICD (*Indonesian Institute for Corporate Governance Directorship*) berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, namun struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sementara itu, penelitian Nurzami, dkk (2015) menyatakan bahwa *good corporate governance* yang diukur menggunakan self assesment dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba

Penelitian lain dilakukan oleh Septiana dan Tarmizi (2015), mereka meneliti pengaruh efektivitas komite audit, konsep amanah dan manajemen laba pada perusahaan perbankan yang termasuk dalam Bank Umum Syariah periode dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Teknik analisis menggunakan Analisis statistik deskriptif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh negatif pada manajemen laba, hasil ini bertentangan dengan penelitian Prabaningrat dan Widanaputra (2015) . Efektivitas komite audit juga memiliki pengaruh negatif pada laba manajemen dan konsep amanah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap manajemen laba. Konsep amanah sebagai variabel moderasi, memoderasi pengaruh antara konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba tetapi tidak memoderasi dalam hubungan antara efektivitas komite audit dan manajemen laba.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Gonzalez dan Mecca (2014), penelitian dilakukan di perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Latin, khususnya, di Argentina, Brazil, Chile, dan Meksiko yang merupakan negara yang masih berkembang, selama periode 2006-2009. Dalam penelitiannya menguji hubungan antara mekanisme corporate governance dan manajemen laba yang diukur dengan diskresioner akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat praktik manipulasi laporan keuangan pada negara-negara berkembang di Amerika Latin cukup tinggi, hal ini dikarenakan tata kelola perusahaan pada negara tersebut belum baik, salah satunya dibuktikan dengan masih banyaknya perusahaan yang memiliki CEO dualitas serta kurang memperhatikan hak pemegang saham minoritas. Hasil juga menunjukkan bagaimana peran direksi

eksternal yang terbatas dan dewan yang lebih sering melakukan pertemuan mengambil posisi yang lebih aktif dalam pemantauan internal (insidier), sehingga menunjukkan penggunaan yang rendah terhadap praktik manipulasi atau manajemen laba.

Indah Putri Septiana dan M. Irfan Tarmizi (2015) Konservatisme Akuntansi, Efektivitas Komite Audit, Konsep Amanah dan Manajemen Laba (pada perusahaan perbankan yang termasuk dalam Bank Umum Syariah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh negatif pada manajemen laba, Efektivitas komite audit juga memiliki pengaruh negatif pada laba manajemen dan konsep amanah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap manajemen

Ni Wayan Nariastiti dan Ni Made Dwi Ratnadi (2014) Pengaruh Asimetri Informasi, Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba (Pada perusahaan yang masuk di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI tahun 2010- 2012) Hasil analisis menunjukkan asimetri informasi yang diukur dengan bid-ask spread berpengaruh positif pada manajemen laba, corporate governance yang diukur dengan skor CGPI berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan ukurran perusahaan diukur dengan total aset berpengaruh negatif pada manajemen laba.

Marinus Gea (2014) Peran Good Corporate Hasilnya menunjukkan bahwa good corporate governance yang Governance dan Struktur Kepemilikan dalam mendeteksi manajemen laba melalui Discretionary Revenue diukur menggunakan indeks dari IICD (Indonesian Institute for Corporate Governance Directorship) berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, namun seluruh variabel struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin

banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan.

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya *agency problems* (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan yang semakin menurun.

Terkait manajemen laba, ukuran dewan komisaris dapat memberi efek yang berkebalikan dengan efek terhadap kinerja. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka akan menyulitkan dalam menjalankan peran mereka, di antaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. Untuk itu hubungan yang terjadi antara ukuran dewan komisaris dan manajemen laba harusnya positif, makin banyak anggota dewan komisaris maka makin banyak manajemen laba yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) serta Gulzar dan Wang (2011) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.3.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional (KNKG, 2016). Berdasarkan Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG (2016), komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap praktik manajemen laba. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Beasley (1996, dalam Nasution, 2007) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, daripada kehadiran komite audit. Pernyataan ini bertolak belakang dengan penelitian Gulzar dan Wang (2011) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara komposisi dewan komisaris dengan manajemen laba. Penelitian lain yang dilakukan oleh Murhadi (2016) juga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari komisaris independen terhadap manajemen laba.

Dari uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.3 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Manajemen Laba

Salah satu variabel yang dapat mengurangi konflik keagenan adalah konservatisme akuntansi (Tuwentina dan Wirama, 2014). Dalam teori keagenan, konservatisme akuntansi dianggap dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Beberapa peneliti menyatakan bahwa konservatisme akuntansi

memiliki peranan dalam teori keagenan untuk penentuan praktik yang paling efisien yang dapat membatasi konflik atau masalah keagenan. menurut Kazemi et al. (2011), prinsip konservatisme pada dasarnya dianggap sebagai keuntungan karena dapat meminimalisir pandangan optimistis pihak manajemen dan menghindari sikap yang cenderung berlebihan dalam penyusunan laporan keuangan. Pada praktiknya agen dalam aktifitasnya seringkali tidak sesuai dengan kontrak kerja kerja yang dibuat dengan prinsipal, dimana agen lebih cenderung untuk meningkatkan kesejahteraanya.

Semakin tinggi konservatisme akuntansi, dapat meminimalkan tindakan manajer untuk melakukan manipulasi dan overstatement pada laporan keuangan (Prabaningrat dan Widanaputra, 2015). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kazemi et al. (2011) yang juga menyatakan bahwa prinsip konservatisme dianggap sebagai keuntungan karena dapat meminimalisir sifat optimis pihak manajemen dan menghindari sikap yang cenderung berlebihan dalam laporan keuangan. Soraya dan Harto (2014) menyimpulkan bahwa variabel konservatisme akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba dengan arah negatif, nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa manajemen menggunakan pola manajemen income decreasing, yaitu melaporkan laba lebih rendah pada periode saat ini untuk mendapatkan laba yang lebih besar pada periode mendatang. Oleh karena itu jika dilakukan manajemen laba, konservatisme akuntansi akan menjadi halangan bagi manajer untuk melakukan pengelolaan laba.

H3 : Konservatisme Akuntansi berpengaruh Negatif terhadap Manajemen Laba

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Hal ini membuat berbagai kebijakan perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar terhadap

kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar cenderung lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka lebih berhati-hati dan akurat dalam melakukan pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Nasution dan Setiawan (2007) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi manajemen laba.

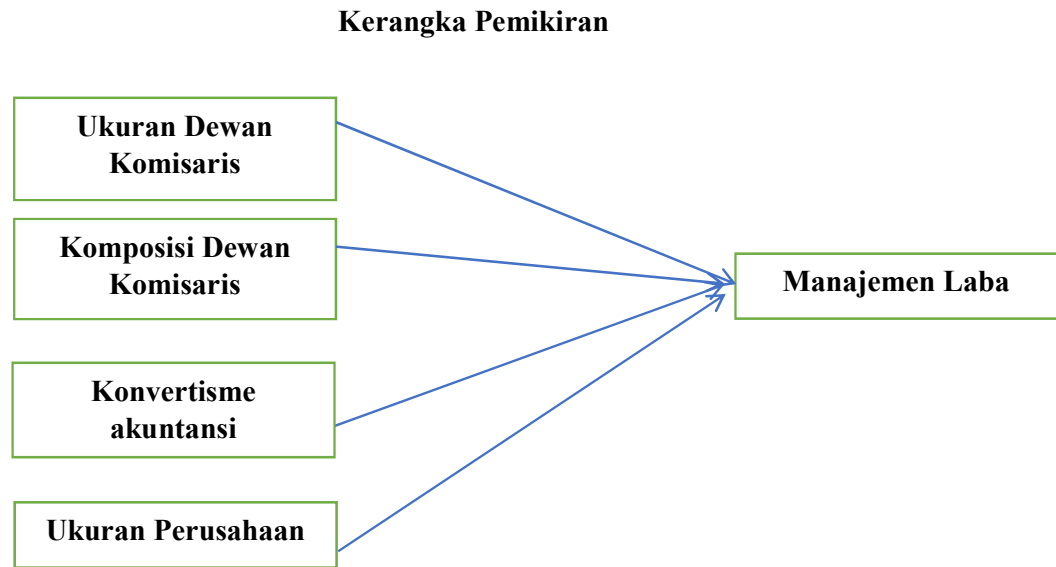
Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba.

2.4 Kerangka Pemikiran

Terjadinya banyak kasus manipulasi terhadap earnings yang sering dilakukan oleh manajemen membuat perusahaan melakukan mekanisme pengawasan atau monitoring untuk meminimalkan praktik manajemen laba. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah penerapan good corporate governance. Penerapan good corporate governance melalui komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan komite audit diduga mampu mempengaruhi praktik manajemen laba. Selain itu ukuran perusahaan juga diduga mampu mempengaruhi manajemen laba. Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah mekanisme corporate governance dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba dan dapat meminimalisasi manajemen laba tersebut. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1



Sumber : Dikembangkan oleh peneliti 2022